**KONFLIK NORMA DALAM PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA**

**ARTIKEL TESIS**

Disusun oleh:

Nama : Cepy Fardina

NPM : 208040060

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Di Bawah Bimbingan:

1. Dr. H. Dedy Hernawan, SH., M.Hum
2. Dr. Berna S. Ermaya., SH., M.H.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Penerimaan Mahasiswa Baru Unpas tahun ajaran 2017/2018 dibuka ... |

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayananan informasi di badan publik. Adapun Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder, dan menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli mengenai adanya permasalahan konflik norma dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sejauhmana cara mewujudkan kepastian hukum tentang keterbukaan informasi publik, akibat hukumnya serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik selaku Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi jika terdapat putusan Komisi Informasi yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: Mewujudkan kepastian hukum; akibat hukum; upaya hukum yang dapat dilakukan.

**ABSTRAC**

*Public Information is information generated, stored, managed, sent, and/or received by a public body related to the organizers and administrators of the state and/or the organizers and operations of other public bodies in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness and other information related to the public interest. The Information and Documentation Management Officer is the official responsible for the field of information documenting, providing, and/or servicing information in public bodies. The Information Commission is an independent institution that functions to implement this Law and its implementing regulations, establishing technical guidelines for public information service standards through mediation and/or non-litigation adjudication.*

*The approach used is a juridical normative approach, which is an approach method that looks at the problems studied by focusing on secondary data, and inventories and examines legal principles and norms contained in various laws and regulations, and expert opinions regarding the problem of norm conflicts in the West Java Provincial Information Commission Decision on the implementation of public information disclosure in Indonesia.*

*The purpose of this study is to know, review and analyze the extent of how to realize legal certainty about public information disclosure, its legal consequences and efforts that can be made by Information and Documentation Management Officers in Public Bodies as Government Officials who have the obligation to implement Information Commission decisions if there are Information Commission decisions that are contrary to the Law.*

*Keywords:* ***Realizing legal certainty; legal consequences; legal remedies that can be taken.***